

ABSTRAK

Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan dalam bidang perpajakan tersebut mempunyai peranan penting dalam keadilan sosial, alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan akumulasi modal, lebih dari itu, kebijakan perpajakan tersebut, dapat berperan untuk mendidik rakyat berkesadaran politik dan bernegara. Manifestasi dari kesadaran berpolitik dan bernegara adalah kerelaan berkorban untuk kepentingan negara, salah satunya adalah kerelaan membayar pajak, dalam hal ini pajak BPHTB dan PPh yang alokasinya dan kewenangannya sudah diserahkan secara langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh berkaitan dengan Akta Jual Beli tanah di Kabupaten Grobogan, untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh di Kabupaten Grobogan, faktor-faktor/hambatan yang timbul dalam penerapan BPHTB dan PPh di Kabupaten Grobogan dan bagaimana peran yang seharusnya PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh di Kabupaten Grobogan .

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer, data sekunder.

Peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh sudah cukup maksimal, terbukti dengan besarnya pajak BPHTB dan PPh yang masuk ke kas Daerah dan Pusat, hanya saja banyak terjadi faktor-faktor/hambatan yang timbul yang mengakibatkan kurang harmonisnya DPPKAD dan PPAT dalam pemungutan BPHTB dan PPh, sehingga terlihat kurang maksimal, dikarenakan sistem *self assessment*, yang menyebabkan sulit mengontrol laporan transaksi yang sebenarnya, untuk itu masih diperlukan kesadaran hukum baik para pihak yang bertransaksi maupun oleh PPAT itu sendiri. Faktor penghambat peran PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh selama ini lebih disebabkan faktor administrasi, seperti pelayanan yang kurang efisien, dan penentuan besarnya nilai transaksi jual beli yang sulit, serta tidak ada pembaharuan yang dilakukan oleh DPPKAD mengenai SPPT PBB yang selama ini dikeluarkan, karena nilai tanah permeter yang tertera sudah tidak sesuai dengan nilai tanah saat ini. Peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh dapat dilakukan lewat sikap proaktif dari PPAT dalam menggali informasi mengenai transaksi riil dari para pihak.

Kata Kunci : Peranan PPAT, BPHTB dan PPh, Jual Beli Tanah.

ABSTRACT

Policy in the field of taxation that can effectively contribute to maintaining economic balance and economic stability of a country. Policy in the field of taxation has an important role in Social Justice, the allocation of resources, income distribution and capital accumulation, more than that, the taxation policies, can serve to educate the people of conscious political and state. Manifestation of political awareness and the state is the willingness to sacrifice for the sake of the country, one of which is the willingness to pay taxes, in this case BPHTB tax and income tax allocation and authorities have been delivered directly from the central government to local governments.

The purpose of this study was to investigate and analyze the role of PPAT in the application BPHTB and income tax related to the Sale and Purchase of land in Grobogan; To identify and analyze how Perana BPHTB PPAT in the application and income tax in the District Grobogan, factors that arise in the application and income tax BPHTB in Grobogan and how the role should PPAT in the application BPHTB and PPh in Grobogan Regency.

The method used is empirical juridical, with analytical descriptive specification, through the collection of primary data, secondary data, and also tertiary.

The role of PPAT in the application BPHTB and Income had enough leverage, as evidenced by the amount of taxes BPHTB and income tax cash coming into the Regional and Central, it's just a lot going on factors that arise that result in the lack of harmony DPPKAD and PPAT in voting BPHTB and income tax, so it looks less than the maximum, due to the self-assessment system, which makes it harder to control the actual transaction reports, it is still necessary for legal awareness of both the parties to a transaction or by PPAT itself. Factors inhibiting the role of PPAT in the application BPHTB and income tax has been more due to factors of administration, such as the services less efficient, and the determination of the value of purchase transactions are difficult and impressed that determine the value of the transaction from the Office DPPKAD and no renewal carried out by DPPKAD about SPPT UN has been issued, because the value of land per meter stamp is not in accordance with the value of the land at this time. PPAT role in the application of income tax BPHTB and can be done through proactive attitude of PPAT in digging information on real transactions of the parties.

Keywords: Role PPAT, BPHTB and Income Tax, Sale and Purchase of Land.